

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN**



**PT BANK HIJRA
TAHUN 2022**

Lembar Persetujuan
Laporan Tahunan Penerapan Tata Kelola
(*Good Corporate Governance*)
PT BPRS HIJRA ALAMI
Tahun 2022



DIMA AUDRA DJANI
KOMISARIS UTAMA



TRI ISRAHARJO SANTOSO
DIREKTUR UTAMA

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I Penjelasan Umum Laporan Penerapan Tata Kelola.....	1
BAB II Laporan Penerapan Tata Kelola.....	2
A. Cakupan Tata Kelola.....	2
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	2
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	3
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	4
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.....	5
B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	6
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.....	9
D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan.....	10
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi.....	10
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi.....	10
E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain.....	11
F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan.....	11
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris.....	11
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris.....	11
G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain.....	11
H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain.....	12
I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS.....	12
J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	13
K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	13
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun.....	14
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	14
L. Frekuensi Rapat DPS	12
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun.....	14
2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas Syariah.....	14
M. Jumlah Penyimpangan Intern (<i>Internal Fraud</i>).....	15
N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS.....	15
O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	15
P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.....	15

Lampiran

Profil Dewan Komisaris, Profil Dewan Pengawas Syariah, Profil Direksi

i

halaman ini sengaja dikosongkan

Penghargaan Yang Diterima Oleh Bank

“sebagai BPR Syariah Inovasi Digital Terbaik versi Republika tahun 2022”



BAB I
PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Bank Hijra adalah bank syariah yang mewujudkan kebutuhan masyarakat akan solusi perbankan yang hadir dalam mobile banking berprinsip syariah dan menggunakan teknologi yang memudahkan.

Alamat	:	Ruko Pondok Indah Plaza 1 Komplek Pertokoan Plaza Pondok Indah Jl. Metro Duta Sektor II Blok UA No. 7-8 Pondok Indah, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310
Nomor Telepon	:	021 27814716 atau 021 27811136
Penjelasan Umum	:	PT BPRS Hijra Alami telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola serta dapat meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan.

BAB II
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

BPRS menyampaikan keterangan mengenai masing-masing aspek pengungkapan sesuai dengan kondisi dan kebijakan BPRS.

A. Cakupan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh kepada RUPS atas pengurusan perusahaan/Bank dengan berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan Undang Undang yang berlaku serta wajib menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola untuk kepentingan dan tujuan Bank Hijra. Penjelasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Tri Israharjo Santoso	Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh arahan, strategi dan pengelolaan organisasi Bank, memastikan bahwa seluruh aspek strategi, aktivitas, program, layanan, dan tata kelola Bank diimplementasikan berdasarkan kepentingan pemegang saham, nasabah, karyawan, dan masyarakat. 2. Memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan bidang pendukung operasional dan layanan perbankan, teknologi informasi, sistem dan prosedur, aspek hukum, aspek finansial, dan sumber daya manusia. 3. Memberikan arahan strategis dalam bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Bank dalam mendukung pencapaian sasaran kerja Bank, menjamin dan memelihara kesesuaian terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
2.	Setyo Prabowo	Direktur Operasional dan membawahi fungsi kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun strategi kepatuhan, termasuk hal yang terkait dengan kebijakan dan prinsip kepatuhan. 2. Memastikan seluruh regulasi (kebijakan, sistem, dan prosedur) internal Bank telah sejalan dengan peraturan dan regulasi eksternal yang terkait (Bank Indonesia, OJK dan lembaga/otoritas lainnya).

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			3. Mengarahkan unit kerja operasional untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan transaksi operasional perbankan dengan standar yang memadai.

Tindak Lanjut Rekomendasi			
Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS**)			
<ol style="list-style-type: none"> Direksi telah melakukan mempertahankan Kinerja Keuangan Hijra dan tingkat kesehatan Bank. Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan fungsi Audit Internal dengan pemenuhan sumber daya insani yang kompeten dan memiliki pengalaman perbankan syariah. Direksi telah mempersiapkan visit Bank Indonesia dalam rangka perizinan mobile banking. Direksi telah memperhatikan struktur remunerasi bagi kesejahteraan karyawan. Direksi telah memfasilitasi pelatihan aspek syariah dalam rangka meningkatkan pengetahuan syariah kepada karyawan. 			

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi yang disampaikan melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi, pemberian saran dan rekomendasi terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen dan evaluasi kinerja Bank Hijra.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Dima Audra Djani	Komisaris Utama	<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			berdasarkan informasi yang benar dan lengkap.
2.	Nuri Wulandari	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. 2. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris. 3. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu.

Rekomendasi Kepada Direksi			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan Kinerja Keuangan Hijra dan tingkat kesehatan Bank. 2. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan fungsi Audit Internal dengan pemenuhan sumber daya insani yang kompeten dan memiliki pengalaman perbankan syariah. 3. Mempersiapkan visit Bank Indonesia dalam rangka perizinan mobile banking. 4. Memperhatikan struktur remunerasi bagi kesejahteraan karyawan. 5. Memfasilitasi pelatihan aspek syariah dalam rangka meningkatkan pengetahuan syariah kepada karyawan. 			

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terkait aspek syariah kepada Direksi dan pemberian opini DPS serta melakukan uji petik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Bahrudin Moyensyah	Ketua DPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas Syariah. 2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya. 3. Memimpin rapat Dewan Pengawas Syariah. 4. Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas Syariah.

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2.	Samsi	Anggota DPS	1. Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedangan yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah. 2. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Sesuai dengan hasil pengamatan dan pengawasan DPS yang telah dilakukan selama periode tahun 2022 bahwa Bank telah melaksanakan kegiatan operasional dan bisnis melalui produk pendanaan, pembiayaan dan aktivitas/jasa yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
001/BPRS-HA/DPS/VIII/2022	29-08-2022		

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Sebagaimana ketentuan yang mengatur BPRS bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat membentuk:

- a. Komite Audit; dan
- b. Komite Pemantau Risiko.

Dalam hal diperlukan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Selama tahun 2022, modal inti Bank Hijra belum mencapai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga kewajiban membentuk Komite Level Dewan Komisaris belum dilakukan dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dibawah ini tabel Komite Level Dewan Komisaris:

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1.	Komite Audit	-	-	-	-
2.	Komite Pemantau Risiko	-	-	-	-

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	-	-	-	-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi

No.	Nama Anggota Komite	Keahlian (***)	Komite****)			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

B. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Peneparan Tata Kelola

Nama BPRS : PT BPRS Hijra Alami
Tahun : 2022

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,1	PK 1
Analisis	
<p>PT BPR Syariah Hijra Alami dalam pengelolaan bank telah menerapkan prinsip prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola yang baik (GCG) sesuai dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku. 2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua bagian berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. 3. Tanggung Jawab (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Bank bertindak sebagai good corporate citizen (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. 4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun. 	

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,1	PK 1
Analisis	
<p>5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.</p> <p>Dalam melaksanakan penerapan tata kelola bank, hal yang mendukung dan telah dilaksanakan oleh bank dalam menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> sebagai berikut:</p> <p>a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>BPRS memiliki 2 anggota Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Operasional Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Anggota Direksi memiliki kapasitas dan kemampuan yang sangat baik dalam menjalankan fungsi dan perannya dimana hal ini dibuktikan dengan pencapaian asset, pemenuhan TKS, dan berbagai penghargaan yang diterima oleh BPRS Hijra Alami.</p> <p>Dewan Komisaris BPRS Hijra Alami beranggotakan 2 orang dimana 1 orang sebagai Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris. Anggota dewan komisaris BPRS Hijra Alami menjalankan fungsi mengawasi atas kebijakan yang dilakukan oleh Direksi dalam melaksanakan kegiatan operasional Bank dengan sangat baik. Rapat rutin yang dilakukan termasuk didalamnya mendapatkan informasi kinerja BPRS telah dijalankan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Dewan Pengawas Syariah BPRS Hijra Alami terdiri dari 2 orang dimana 1 orang Ketua DPS dan 1 anggota DPS. Dalam setiap aktifitas dan produk bank, DPS dilibatkan sebagai pengawas atas penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bank antara lain dalam hal bank mengeluarkan produk, bank meminta kepada DPS memberikan opini atas produk yang akan dihasilkan.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS merupakan pihak yang independen dan merupakan tenaga profesional serta memiliki pengalaman dan telah dinyatakan kompeten dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper</i>) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau dengan anggota Direksi dan atau dengan anggota DPS.</p> <p>Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan sangat baik sesuai ketentuan yang berlaku. Keberhasilan dalam menjalankan operasional dapat dilihat dari indikator naiknya laba perusahaan, pertumbuhan asset, dana, dan pembiayaan serta indikator lain seperti penurunan tingkat BOPO, angka NPF.</p>	

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,1	PK 1
Analisis	
<p>b. Pelaksanaan Prinsip Syariah</p> <p>Dalam pelaksanaan prinsip syariah di Bank Hijra Alami, Bank didukung oleh sumber daya insani yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam bidang syariah.</p> <p>Proses pengembangan produk dan/atau aktifitas baru senantiasa memperhatikan fatwa DSM dan opini DPS, dibuktikan dengan senantiasa dilakukan rapat yang didalamnya membahas terkait produk yang akan dijalankan oleh BPRS Hijra Alami sebelum BPRS Hijra Alami berhasil mendapatkan ijin Penyelenggara Jasa Pembayaran dan juga penghargaan lain.</p> <p>c. Benturan Kepentingan</p> <p>Kebijakan terkait benturan kepentingan tercantum dalam kebijakan penerapan tata kelola yang ada di BPRS Hijra Alami.</p> <p>Tidak terdapat kejadian benturan kepentingan yang berakibat merugikan dan atau mengurangi keuntungan BPRS Hijra Alami.</p> <p>d. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern</p> <p>BPRS Hijra Alami senantiasa memperhatikan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam baik dari kelengkapan struktur dan juga infrastrukturnya, Bank berusaha untuk melakukan perbaikan untuk selalu memenuhi hal-hal yang telah digariskan oleh pihak regulator seperti melakukan pengkinian, penyempurnaan dan melengkapi kebijakan, prosedur, petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis, menurunkan tingkat pelanggaran, dan hal lain yang terkait dengan penerapan tata kelola.</p> <p>Audit internal BPRS Hijra Alami telah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menjaga dan mengawasi keberlangsungan proses yang dijalankan oleh setiap unit kerja. Audit Interna BPRS Hijra Alami memastikan bahwa tiap unit dalam melakukan pekerjaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>BPRS Hijra Alami menunjuk pihak audit eksternal melalui rekomendasi audit dan disetujui dewan komisaris serta mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Audit Eksternal bekerja secara independen dan profesional adalah sebagai bukti transparansi yang dilakukan oleh pihak BPRS Hijra Alami.</p> <p>e. Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal</p> <p>BPRS Hijra Alami memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko. Unit Manajemen Risiko senantiasa dilibatkan dalam proses operasional termasuk dalam hal penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Dalam tugasnya unit manajemen risiko melakukan indentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta disampaikan dalam bentuk dokumen.</p>	

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,1	PK 1
Analisis	
<p>f. Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS Hijra Alami memiliki kebijakan pembiayaan dan prosedur terkait batas maksimum penyaluran dana. Tidak terdapat pelampauan dan pelanggaran atas dalam penyaluran dana oleh BPRS Hijra Alami.</p> <p>g. Rencana Bisnis BPRS BPRS Hijra Alami membuat dan melaporkan Rencana Bisnis BPRS kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembuatan RBB memperhatikan / mempertimbangkan berbagai aspek termasuk faktor intern dan ekstern yang akan mempengaruhi keberlangsungan usaha BPRS, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat, dan prinsip syariah.</p> <p>Rencana Bisnis BPRS Hijra Alami disetujui dan pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Komisaris dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.</p> <p>h. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPRS Hijra Alami melakukan proses pergantian <i>core banking system</i> (CBS) dalam rangka memperkuat sistem operasional termasuk penyampaian informasi keuangan bank yang akurat, lengkap, terkini, dan utuh. Dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, BPRS Hijra Alami melaporkannya secara tepat waktu termasuk dalam laporan keuangan dan laporan publikasi.</p> <p>Terkait dengan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, BPRS Hijra Alami memiliki unit kerja yang bertugas untuk menangani hal ini. BPRS Hijra Alami juga menjaga penggunaan data pribadi nasabah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atas data tersebut.</p>	

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank Hijra atau lebih dari modal disetor Bank Hijra yang dijelaskan melalui tabel berikut ini:

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS Yang Bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Tri Israharjo Santoso	-	-	PT Nayaka Mitra Renov Indotama	5%
2.	Setyo Prabowo	-	-	-	-

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

Direksi Bank Hijra tidak memiliki hubungan afiliasi atau keterikatan atau ketergantungan dalam hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga, antar pejabat, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Berikut dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Tri Israharjo Santoso	-	-	-
2.	Setyo Prabowo	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Tri Israharjo Santoso	-	-	-
2.	Setyo Prabowo	-	-	-

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kepemilikan saham yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Hijra Bank, maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS Yang Bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dima Audra Djani	1.000.000	1,0	PT Alami Teknologi Sharia	99,90
		-	-	Alami Technologies PTE Ltd	10,97
2.	Nuri Wulandari	-	-	BPR Harta Tanamas	25,25

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS Yang Bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
				BPR Centra Kreditama	10,00
				BPR Catur Jaya Artha	9,00
				BPR Universal	2,66
				BPR Adil Jaya Artha	10,00
				PT Gotong Royong	40,00

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

Salah satu bentuk penerapan tata kelola dalam Bank Hijra adalah dengan adanya keterbukaan informasi mengenai hubungan afiliasi atau keterikatan atau ketergantungan dalam hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga, antar pejabat, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Berikut dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Dima Audra Djani	-	-	Dima Audra Djani
2.	Nuri Wulandari	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Dima Audra Djani	-	-	-
2.	Nuri Wulandari	-	-	-

G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah mengatur perihal rangkap jabatan bagi struktur Dewan Komisaris di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) maupun lembaga bukan keuangan.

Berikut rangkap jabatan Dewan Komisaris Hijra Bank:

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/ BPR/Lembaga/Perusahaan***)	Jabatan
1.	Dima Audra Djani	Alami Teknologi Sharia	Direktur Utama
		Alami Technologies PTE LTD	Direktur
2.	Nuri Wulandari	BPR Harta Tanamas	Komisaris
		PT Gotong Royong	Komisaris

H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, khususnya terkait dengan DPS yaitu Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain dengan informasi sebagai berikut:

No.	Nama Anggota DPS**)	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain***)	Jabatan
1.	Bahrudin Moyensyah	-	-
2.	Samsi	-	-

I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

Selama tahun 2022, jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji Pokok	2	312.000.000	2	120.000.000	2	132.000.000
2.	Tunjangan	1	78.000.000	-	-	2	9.000.000
3.	Tantiem	-	-	-	-	-	-
4.	Bonus	-	-	-	-	-	-
5.	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-	-	-
6.	Remunerasi Lainnya	-	6.000.000	-	-	-	-
Total Remunerasi			396.000.000		120.000.000		141.000.000
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
2.	Transportasi	-	-	-	-	-	-
3.	Kesehatan	-	-	-	-	-	-
4.	Fasilitas Lain- Lainnya*)	-	-	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			-		-		-
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		396.000.000		120.000.000		141.000.000

J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Dibawah ini pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan berikut:

Deskripsi*)	Rasio**)
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	35.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah	38.00
Rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah	27.50
Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah	50.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	27.50
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	50.00

K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rapat Dewan Komisaris dilakukan Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan Rapat Dewan Komisaris tersebut telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Dibawah ini adalah rekapitulasi rapat Dewan Komisaris:

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	11 Maret 2022	2	Kinerja Keuangan BPRS, Peningkatan Fungsi Audit Internal.
2.	30 Juni 2022	2	Kinerja BPRS, Evaluasi KAP yang ditunjuk, persiapan visitasi regulator terkait dengan pengajuan <i>mobile banking</i> .
3.	5 Juli 2022	2	Struktur Remunerasi Proporsional bagi karyawan.
4.	22 September 2022	5	Kinerja BPRS, Penerapan APU PPT, Arahan Dewan Komisaris.
5.	13 Desember 2022	5	Kinerja BPRS.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%) **)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Dima Audra Djani	2	3	100%
2.	Nuri Wulandari	1	4	100%

L. Frekuensi Rapat DPS

Rapat DPS wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan hal ini telah sesuai dengan rapat yang terjadi selama tahun 2022 yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali rapat DPS. Informasi rapat tersebut sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat DPS dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	9 Februari 2022	1	Hadiah dalam Tabungan Wadiah.
2.	11 Mei 2022	1	Sahabat Hijra <i>Referral Programme (Member Get Member)</i> .
3.	15 Agustus 2022	6	<ol style="list-style-type: none"> Pencapaian BPRS Hijra. Rencana Penambahan Fitur Mobile Banking dan Rencana Penggunaan Akad <i>Musyarakah Muntahia Bit Tamlik (MMBT)</i>. Rencana Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Periode Semester I tahun 2022.
4.	26 Agustus 2022	3	Tindak Lanjut Pelaporan Dewan Pengawas Syariah Periode Semester I tahun 2022.
5.	Oktober 2022	3	<ol style="list-style-type: none"> Program Deposito Berhadiah. Program <i>Member Get Member</i>. Pembiayaan dengan Akad <i>Musyarakah Muntahiah Bit Tamlik (MMBT)</i>. PPR Akad <i>Murabahah</i>.
6.	7 November 2022	4	<ol style="list-style-type: none"> Tarik Setor Tunai Menggunakan Mobile Banking di Counter Teller Hijra Bank. Sedekah Reguler.
7.	19 Desember 2022	5	<ol style="list-style-type: none"> Hijra for Business Individual (Tabungan Hijra Wadiah Bisnis - Individual). Konversi Tabungan.

2. Kehadiran Anggota DPS

No	Nama Anggota DPS*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%) **)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Bahrudin Moyensyah	-	7	100%
2.	Samsi	1	6	100%

M. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Selama 1 Januari hingga 31 Desember 2022, Bank Hijra tidak memiliki penyimpangan intern/kecurangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tabel dibawah ini:

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)*)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya**)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

Selama 1 Januari hingga 31 Desember 2022, Bank Hijra tidak memiliki permasalahan hukum baik terkait Dewan Komisaris, Direksi maupun Perusahaan. Berikut poin permasalahan hukum tersebut:

Permasalahan Hukum*)	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2022, Bank Hijra tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan atau transaksi/keputusan lain yang dapat merugikan Bank.

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan**)		Pengambil Keputusan*)		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Penjelasan***)
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
	-	-	-	-	-	-	-

P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2022, Bank Hijra tidak melakukan penyaluran dana untuk kegiatan sosial maupun kegiatan politik sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	-	-	-	-	-
2.					

Profil Manajemen Hijra Bank

Dewan Pengawas Syariah



Drs.H. Bahruddin Moyensyah, M.M

Dewan Pengawas Syariah

Sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, Beliau mengenyam pendidikan dari Fakultas Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada 1999 dengan gelar Master of Management, sebelumnya beliau juga mengambil studi dari Fakultas Ushuluddin/Da'wah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada 1988 dan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Syeh Yusuh Jakarta pada 1984.



Samsi, S.H.I, MA

Dewan Pengawas Syariah

Sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, Beliau mengenyam pendidikan dari Fakultas Tafsir Institut PTIQ Jakarta pada 2022 dengan gelar Doktor dan sebelumnya, beliau mengambil studi Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Quran pada 2013 dengan gelar Master, dan Fakultas Syariah, STAI Darunnajah Jakarta pada 2002.

Dewan Komisaris



Dima Audra Djani

Komisaris Utama

Sebagai Komisaris Utama, Beliau memiliki gelar Sarjana Manajemen Bisnis bidang Keuangan dan Kewirausahaan dari Universitas RMIT tahun 2009 dan Magister Administrasi Bisnis (MBA) dari INSEAD pada tahun 2018. Sebelumnya, beliau memegang berbagai posisi Corporate Investment Banking untuk Citigroup dan Societe Generale.



Nuri Wulandari

Komisaris

Sebagai Komisaris, Beliau memiliki gelar Doktor bidang Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia dan Master of Science dalam bidang Marketing dari University of Birmingham, Inggris. Sebelumnya, beliau telah memegang posisi sebagai Komisaris BPR sejak 2008.



Tri Israharjo Santoso

Direktur Utama

Sebagai Direktur Utama, Beliau mengenyam pendidikan dari Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran pada tahun 2003, Sebelumnya beliau telah memegang posisi Direktur Utama pada PT Maslahat Indonesia Mandiri atau Bsalam. Jabatan sebelumnya pernah diemban oleh beliau yaitu sebagai Commercial Business Manager/CBC Head pada PT Bank Mega Syariah, setelah menjabat sebagai Regional Head Jakarta selama 2 Tahun.



Setyo Prabowo

Direktur Operasional

Sebagai Direktur Operasional yang membawahi fungsi kepatuhan, Beliau mengenyam pendidikan dari Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen Resiko, ABFI Perbanas pada tahun 2016 dengan gelar Magister Management (MM). Sebelumnya beliau mengambil studi di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Diponegoro pada 2002 dan sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur pada BPRS Al Barokah (Depok).